PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

PERUBAHAN
RENJA
Rencana Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Bantul
Tahun 2026

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 59 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang:

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah dan berkesinambungan perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan dan terintegrasi perlu dilakukan upaya sinergi melalui koordinasi dan perencanaan dengan seluruh pemangku kepentingan;
c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat sehingga perlu dilakukan penyesuaian Rencana Kerja Perangkat Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun
2. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan dan penganggaran yang berisi perubahan rencana pendapatan, perubahan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta perubahan rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bantul.
6. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2026.
(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2026.

Pasal 3

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026
BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV : PENUTUP
(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 21 Agustus 2026
BUPATI BANTUL

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 21 Agustus 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026 NOMOR 59

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 59 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

PERUBAHAN

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2026

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2026 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026. Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 163 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1108);
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52);
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul;
m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 51);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunya Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026

Evaluasi Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian realisasi DPA Dinas Komunikasi dan Informatika. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2026

No		K ode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**			**117.448.624.615**		**13.954.278.189**		**19.507.318.769**		**2.149.087.498**		**6.235.259.522**						**8.384.347.020**	**63,02**	**42,98**		**8.384.347.020**	**30,29**	**7,14**		
		2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**36.741.125.454**		**8.117.063.190**		**8.597.481.877**		**665.085.867**		**3.636.452.794**						**4.301.538.661**	**69,47**	**50,03**		**4.301.538.661**	**27,14**	**11,71**	Dinas Komunikasi dan Informatika	
			Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	94,7		0		94,3		0		0						0		0		0		0			
				Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Angka)	82		0		81,6		0		81,7						81,7		100,12		81,7		99,63			
		2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			121.837.500		31.640.000		2.450.000		1.700.000		-						1.700.000	0	69,39		1.700.000	5	1,4		
			Terwujudnya laporan capaian kinerja keuangan, data serta bahan evaluasi untuk akuntabilitas Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	20		0		4		2		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	80		4		0		4		4						8		0		8		10			
		2.16.01.2.01.00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			49.250.000		18.085.000		2.450.000		1.700.000		-						1.700.000	0	69,39		1.700.000	0	3,45		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	20		0		4		2		0						0		0		0		0			
		2.16.01.2.01.00 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			72.587.500		13.555.000		-		-		-						-	0	0		-	10	0		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	80		4		0		4		4						8		0		8		10			
		2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			31.299.223.544		6.837.956.817		7.752.373.796		532.014.361		3.372.449.451						3.904.463.812	75	50,36		3.904.463.812	34,81	12,47		
			Terwujudnya sistem administrasi Keuangan yang akuntabel, tertib dan lancar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	54		54		54		54		54						54		100		27		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD (Laporan)	90		3		0		4		4						4		0		4		4,44			
		2.16.01.2.02.00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			30.517.723.544		6.698.711.817		7.600.153.796		499.959.361		3.341.294.451						3.841.253.812	100	50,54		3.841.253.812	50	12,59		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	54		54		54		54		54						54		100		27		50			
		2.16.01.2.02.00 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			761.100.000		135.420.000		152.220.000		32.055.000		31.155.000						63.210.000	50	41,53		63.210.000	50	8,31		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		2.16.01.2.02.00 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			20.400.000		3.825.000		-		-		-						-	0	0		-	4,44	0		
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD (Laporan)	90		3		0		4		4						4		0		4		4,44			
		2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			20.187.500		5.100.000		-		-		-						-	0	0		-	5	0		
			Terwujudnya sistem administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang akuntabel, tertib dan lancar	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	60		3		0		3		3						3		0		3		5			
		2.16.01.2.03.00 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			20.187.500		5.100.000		-		-		-						-	0	0		-	5	0		
			Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	60		3		0		3		3						3		0		3		5			
		2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			99.800.000		25.545.000		-		-		-						-	0	0		-	10	0		
			Terwujudnya sistem administrasi kepegawaian yang akuntabel, tertib dan lancar	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	60		3		0		3		3						6		0		6		10			

No		K ode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		2.16.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			99.800.000		25.545.000		-		-		-						-	0	0		-	10	0		
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	60		3		0		3		3						6		0		6		10			
		2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.668.497.610		455.571.592		244.554.434		20.054.650		114.443.852						134.498.502	80,22	55		134.498.502	28,31	8,06		
			Terwujudnya sistem administrasi umum yang akuntabel, tertib dan lancar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	65		4		13		4		4						8		61,54		8		12,31			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8		0		5		3		2						5		100		5		62,5			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	35		7		7		3		4						7		100		7		20			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10		2		2		2		2						2		100		2		20			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3		3		3		3		3						3		100		3		100			
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	60		3		12		3		3						6		50		6		10			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		3		12		3		3						6		50		6		10			
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	60		3		0		3		3						6		0		6		10			
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	60		3		0		3		3						6		0		6		10			
		2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			59.923.450		12.532.650		11.984.690		3.295.150		3.304.530						6.599.680	61,54	55,07		6.599.680	12,31	11,01		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	65		4		13		4		4						8		61,54		8		12,31			
		2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			499.000.000		108.065.000		93.850.000		700.000		85.984.000						86.684.000	100	92,36		86.684.000	62,5	17,37		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8		0		5		3		2						5		100		5		62,5			
		2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			92.383.660		23.904.000		11.691.244		4.243.100		1.993.700						6.236.800	100	53,35		6.236.800	20	6,75		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	35		7		7		3		4						7		100		7		20			
		2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			19.310.500		3.276.300		2.743.000		716.400		898.000						1.614.400	100	58,86		1.614.400	20	8,36		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10		2		2		2		2						2		100		2		20			
		2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			22.500.000		5.395.000		3.000.000		825.000		825.000						1.650.000	100	55		1.650.000	100	7,33		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3		3		3		3		3						3		100		3		100			
		2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			39.312.500		14.972.500		2.370.000		600.000		500.000						1.100.000	50	46,41		1.100.000	10	2,8		
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	60		3		12		3		3						6		50		6		10			
		2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			897.605.000		277.438.642		118.915.500		9.675.000		20.938.622						30.613.622	50	25,74		30.613.622	10	3,41		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		3		12		3		3						6		50		6		10			
		2.16.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			20.187.500		5.100.000		-		-		-						-	0	0		-	10	0		
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	60		3		0		3		3						6		0		6		10			
		2.16.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			18.275.000		4.887.500		-		-		-						-	0	0		-	10	0		
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	60		3		0		3		3						6		0		6		10			
		2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.694.079.300		267.949.211		325.787.947		63.847.456		70.410.891						134.258.347	50	41,21		134.258.347	10	7,93		

No		K ode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60		3		12		3		3						6		50		6		10			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		3		12		3		3						6		50		6		10			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		3		12		3		3						6		50		6		10			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		3		12		3		3						6		50		6		10			
		2.16.01.2.08.00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			36.180.000		8.931.000		6.000.000		3.000.000		3.000.000						6.000.000	50	100		6.000.000	10	16,58		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60		3		12		3		3						6		50		6		10			
		2.16.01.2.08.00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			150.000.000		25.970.401		30.000.000		4.244.792		6.351.647						10.596.439	50	35,32		10.596.439	10	7,06		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		3		12		3		3						6		50		6		10			
		2.16.01.2.08.00 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			124.856.100		21.011.230		13.300.519		3.111.900		4.140.770						7.252.670	50	54,53		7.252.670	10	5,81		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		3		12		3		3						6		50		6		10			
		2.16.01.2.08.00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.383.043.200		212.036.580		276.487.428		53.490.764		56.918.474						110.409.238	50	39,93		110.409.238	10	7,98		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		3		12		3		3						6		50		6		10			
		2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.837.500.000		493.300.570		272.315.700		47.469.400		79.148.600						126.618.000	100	46,5		126.618.000	66,67	6,89		
			Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	17		17		17		17		17						17		100		17		100			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	186		186		186		186		186						186		100		186		100			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		0		0		0						0		0		0		0			
		2.16.01.2.09.00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			1.070.750.000		268.716.320		186.145.700		27.179.900		50.338.600						77.518.500	100	41,64		77.518.500	100	7,24		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	17		17		17		17		17						17		100		17		100			
		2.16.01.2.09.00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			448.500.000		112.169.000		86.170.000		20.289.500		28.810.000						49.099.500	100	56,98		49.099.500	100	10,95		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	186		186		186		186		186						186		100		186		100			
		2.16.01.2.09.00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			318.250.000		112.415.250		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		0		0		0						0		0		0		0			
		2.16.02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**			**10.088.022.893**		**2.730.656.039**		**1.682.167.036**		**136.791.440**		**491.740.399**						**628.531.839**	**60**	**37,36**		**628.531.839**	**24,38**	**6,23**	Dinas Komunikasi dan Informatika	
			Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (%)	99		0		98,6		0		0						0		0		0		0			
		2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			10.088.022.893		2.730.656.039		1.682.167.036		136.791.440		491.740.399						628.531.839	60	37,36		628.531.839	24,38	6,23		
			Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	80		52		60		54		54						54		90		54		67,5			
				Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	100		5		20		5		5						10		50		10		10			

No		K ode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	60		3		12		3		3						6		50		6		10			
				Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	60		3		12		3		3						6		50		6		10			
		2.16.02.2.01.00 15	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat			2.559.330.400		651.419.600		226.216.000		14.600.000		52.871.998						67.471.998	90	29,83		67.471.998	67,5	2,64		
			Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	80		52		60		54		54						54		90		54		67,5			
		2.16.02.2.01.00 17	Pelayanan Informasi Publik			428.449.900		68.452.000		14.700.000		-		9.900.000						9.900.000	50	67,35		9.900.000	10	2,31		
			Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	100		5		20		5		5						10		50		10		10			
		2.16.02.2.01.00 19	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik			2.256.924.800		419.109.300		250.855.160		45.418.545		79.389.689						124.808.234	50	49,75		124.808.234	10	5,53		
			Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	60		3		12		3		3						6		50		6		10			
		2.16.02.2.01.00 21	Pengelolaan Media Komunikasi Publik			4.843.317.793		1.591.675.139		1.190.395.876		76.772.895		349.578.712						426.351.607	50	35,82		426.351.607	10	8,8		
			Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	60		3		12		3		3						6		50		6		10			
		2.16.03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**			**70.619.476.268**		**3.106.558.960**		**9.227.669.855**		**1.347.210.191**		**2.107.066.329**						**3.454.276.520**	**50**	**37,43**		**3.454.276.520**	**44**	**4,89**	Dinas Komunikasi dan Informatika	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Tingkat kematangan layanan jaringan intra pemerintah (Angka)	1,8		0		1,6		0		0						0		0		0		0			
				Tingkat kematangan pembangunan/pengembangan aplikasi (Angka)	1,8		0		1,6		0		0						0		0		0		0			
		2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			70.619.476.268		3.106.558.960		9.227.669.855		1.347.210.191		2.107.066.329						3.454.276.520	50	37,43		3.454.276.520	44	4,89		
			Meningkatnya Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah)	45		45		45		45		45						45		100		45		100			
				Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)	135		0		23		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali (Laporan)	10		0		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Aplikasi)	100		0		16		4		4						8		50		8		8			
				Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	17		0		17		17		17						34		200		34		200			
				Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.16.03.2.02.00 24	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota			38.907.537.636		3.106.558.960		2.019.983.104		150.153.424		600.070.345						750.223.769	100	37,14		750.223.769	100	1,93		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan	45		45		45		45		45						45		100		45		100			

No		K ode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah)																								
		2.16.03.2.02.0032	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE			3.795.708.000		-		631.260.000		64.745.090		185.169.255						249.914.345	0	39,59		249.914.345	0	6,58		
			Terlaksananya pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)	135		0		23		0		0						0		0		0		0			
		2.16.03.2.02.0033	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah			20.328.128.000		-		5.193.125.000		1.059.733.400		972.587.599						2.032.320.999	0	39,13		2.032.320.999	0	10		
			Terlaksananya penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali (Laporan)	10		0		2		0		0						0		0		0		0			
		2.16.03.2.02.0034	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan			2.904.159.000		-		528.770.000		44.305.918		116.398.702						160.704.620	50	30,39		160.704.620	8	5,53		
			Terlaksananya Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Aplikasi)	100		0		16		4		4						8		50		8		8			
		2.16.03.2.02.0036	Penyediaan Akses Internet			2.577.674.632		-		595.546.500		-		143.231.698						143.231.698	200	24,05		143.231.698	200	5,56		
			Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	17		0		17		17		17						34		200		34		200			
		2.16.03.2.02.0037	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah			1.343.170.800		-		175.235.251		26.322.359		67.608.730						93.931.089	0	53,6		93.931.089	0	6,99		
			Terlaksananya koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas			763.098.200		-		83.750.000		1.950.000		22.000.000						23.950.000	0	28,6		23.950.000	0	3,14		
			Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**				**1.909.000.799**		**-**		**250.936.634**		**42.456.359**		**52.959.730**						**95.416.089**	**0**	**38,02**		**95.416.089**	**0**	**5**		
	2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**				**1.909.000.799**		**-**		**250.936.634**		**42.456.359**		**52.959.730**						**95.416.089**	**0**	**38,02**		**95.416.089**	**0**	**5**	Dinas Komunikasi dan Informatika	
			Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	100		0		100		0		0						0		0		0		0			
				Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah (%)	100		0		100		0		0						0		0		0		0			
		2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			1.909.000.799		-		250.936.634		42.456.359		52.959.730						95.416.089	0	38,02		95.416.089	0	5		
			Meningkatnya kualitas, aksesibilitas, dan pemanfaatan data statistik sektoral yang akurat dan terstandarisasi untuk mendukung perencanaan pembangunan, pengambilan keputusan, dan pelayanan publik yang berbasis data	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%)	100		0		100		0		0						0		0		0		0			
				Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral (%)	100		0		100		0		0						0		0		0		0			
		2.20.02.2.01.0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia			1.272.675.799		-		128.950.000		19.100.000		25.800.000						44.900.000	0	34,82		44.900.000	0	3,53		
			Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%)	100		0		100		0		0						0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		2.20.02.2.01.0021	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar			636.325.000		-		121.986.634		23.356.359		27.159.730						50.516.089	0	41,41		50.516.089	0	7,94		
			Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral (%)	100		0		100		0		0						0		0		0		0			
		2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**			**6.023.253.241**		**-**		**1.181.796.256**		**233.104.025**		**159.508.613**						**392.612.638**	**100**	**33,22**		**392.612.638**	**100**	**6,52**		
		2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**			**6.023.253.241**		**-**		**1.181.796.256**		**233.104.025**		**159.508.613**						**392.612.638**	**100**	**33,22**		**392.612.638**	**100**	**6,52**	Dinas Komunikasi dan Informatika	
			Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi di Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat keamanan informasi pemerintah (%)	90,6		91,83		90,2		0		0						0		0		0		0			
		2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			4.037.816.100		-		875.790.000		178.393.021		145.565.755						323.958.776	100	36,99		323.958.776	100	8,02		
			Terselenggaranya Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)	45		0		45		45		45						45		100		45		100			
		2.21.02.2.01.0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah			4.037.816.100		-		875.790.000		178.393.021		145.565.755						323.958.776	100	36,99		323.958.776	100	8,02		
			Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)	45		0		45		45		45						45		100		45		100			
		2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota			1.985.437.141		-		306.006.256		54.711.004		13.942.858						68.653.862	100	22,44		68.653.862	100	3,46		
			Terlaksananya Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten Bantul	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah. (Kegiatan)	45		0		45		45		45						45		100		45		100			
		2.21.02.2.02.0002	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah			1.985.437.141		-		306.006.256		54.711.004		13.942.858						68.653.862	100	22,44		68.653.862	100	3,46		
			Terlaksananya Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah. (Kegiatan)	45		0		45		45		45						45		100		45		100			
		2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**			**3.253.096.000**		**169.743.363**		**125.000.000**		**-**		**-**						**-**	**100**	**0**		**-**	**100**	**0**		
		2.22.08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**			**3.253.096.000**		**169.743.363**		**125.000.000**		**-**		**-**						**-**	**100**	**0**		**-**	**100**	**0**	Dinas Komunikasi dan Informatika	
			Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di masyarakat	Indeks Teknologi Informasi dan Komunikasi (Indeks)	2,58		0		2,54		0		0						0		0		0		0			
		2.22.08.5.04	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan			3.253.096.000		169.743.363		125.000.000		-		-						-	100	0		-	100	0		
			Terlaksananya pembangunan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan di Kabupaten Bantul	Jumlah Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital yang Dibangun (Objek)	6		5		6		6		6						6		100		6		100			
		2.22.08.5.04.0002	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital			3.253.096.000		169.743.363		125.000.000		-		-						-	100	0		-	100	0		
			Terlaksananya Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	Jumlah Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital yang Dibangun (Objek)	6		5		6		6		6						6		100		6		100			
		JUMLAH				**128,633,974,655**		**14,124,021,552**		**21,065,051,659**		**2,424,647,882**		**6.447.727.865**						**8,872,375,747**				**8,872,375,747**				
		Rata-rata capaian kinerja (%)																			**62,55**	**42,12**			**34,1**	**6,9**		**SUB KEGIATAN**
		Predikat kinerja																			**Rendah**	**Sangat Rendah**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
		Rata-rata capaian kinerja (%)																			**11,12**				**11,07**			**PROGRAM**
		Predikat kinerja																			**Sangat Rendah**				**Sangat Rendah**			

Sumber: SIPD, diakses tanggal 14 Agustus 2026

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026 sampai dengan Trwiwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

1. Efisiensi Anggaran dan Selisih Pagu Penawaran/Tagihan:
   a) Jasa Utama (Listrik, Air, Komunikasi): Terdapat sisa pagu anggaran akibat nilai realisasi tagihan bulanan dari penyedia berada di bawah plafon Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ).
   b) Pemeliharaan Kendaraan Dinas: Efisiensi anggaran terjadi karena kondisi fisik kendaraan perorangan/dinas jabatan berada dalam kondisi baik dan tidak memerlukan pemeliharaan berat sepanjang semester pertama.
   c) Honorarium Tenaga Ahli: Terbentuknya sisa belanja dari selisih antara efisiensi hasil negosiasi kontrak Tenaga Ahli Programmer dengan plafon anggaran awal.
2. Kendala Administratif dan Sistem Pengadaan:
   Belanja Reklame: Terhambatnya proses penyelesaian SPJ akibat penyesuaian regulasi pelimpahan wewenang pengadaan dari PPTK ke KPA pada aplikasi INAPROC yang berdampak pada keterlambatan realisasi serta memicu potensi SILPA.
3. Ketergantungan Eksternal dan Dinamika Kegiatan:
   SPPD Luar Daerah: Belum optimalnya realisasi anggaran perjalanan dinas karena sifat kegiatannya yang menyesuaikan agenda dan undangan dari Pemerintah Pusat yang dinamis serta fluktuatif.
4. Tantangan Teknis dan Tata Kelola Sub-Urusan:
   a) Urusan Komunikasi dan Informatika
      1) Infrastruktur dan Jangkauan Jaringan:
         Masih terdapat wilayah *blank spot* dan sinyal lemah (*weak spot*) di beberapa titik strategis/daerah pinggiran akibat keterbatasan perluasan jaringan fiber optic dan infrastruktur pemancar.
      2) Integrasi dan Sistem Pelayanan Publik:
         Belum optimalnya integrasi dan interoperabilitas antar-platform aplikasi pelayanan umum, yang memicu terjadinya duplikasi sistem dan fragmentasi data pelayanan.

3) Manajemen Kanal Informasi dan Opini Publik:

   Belum maksimalnya cakupan penyebaran informasi program prioritas daerah serta kurang responsifnya tata kelola pengaduan masyarakat secara *real-time* di seluruh kanal media publik.

4) Kemitraan dan Literasi Digital:

   Kemitraan dengan media massa dan penguatan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) belum optimal dalam mengedukasi publik serta meminimalisir penyebaran disinformasi/hoaks.

b) Urusan Persandian

1) Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kapasitas Teknis:

   Keterbatasan jumlah dan kualifikasi sertifikasi kompetensi SDM di bidang *cyber security*, *incident response*, dan digital forensik.

2) Infrastruktur dan Tata Kelola Keamanan:

   Belum terpenuhinya infrastruktur pengamanan informasi secara menyeluruh, seperti audit keamanan sistem informasi secara berkala (*penetration testing*) dan pemenuhan standar ISO 27001 pada seluruh aplikasi kritis.

3) Pemanfaatan Sertifikat Elektronik dan *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT):

   Implementasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) dan pemanfaatan sertifikat elektronik belum merata di seluruh Perangkat Daerah, disertai belum optimalnya operasional *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT) daerah dalam mitigasi ancaman siber.

4) Budaya dan Kesadaran Keamanan Siber:

   Masih rendahnya tingkat kesadaran (*awareness*) Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap ancaman keamanan informasi dan kerentanan *social engineering* (seperti *phishing*).

c) Urusan Statistik

1) Standardisasi dan Interoperabilitas Data:

Belum seragamnya pemahaman dan penerapan standar data, metadata, serta kaidah interoperabilitas data di tingkat Perangkat Daerah sebagai produsen data.

2) Dukungan Satu Data Indonesia (SDI):
   Integrasi Portal Data Sektoral Daerah ke dalam Portal Satu Data Indonesia belum berjalan secara berkesinambungan akibat masih ditemukannya perbedaan format dan keterlambatan pembaharuan (*updating*) data secara berkala.

3) Kapasitas Pengelola Data:
   Terbatasnya kuantitas dan kualitas Jabatan Fungsional Statisisi maupun pengelola data di masing-masing Perangkat Daerah untuk melakukan validasi, analisis, dan penyajian data statistik yang akurat.

4) Pemanfaatan Data dalam Kebijakan:
   Belum optimalnya pemanfaatan data statistik sektoral sebagai basis utama (*evidence-based policy*) dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pengambilan keputusan prioritas daerah.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi penyesuaian target kinerja dan rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2026 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Penyesuaian target kinerja dan rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2026 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II dan kebutuhan prioritas yang harus ditindaklanjuti.

3.1. Penyesuaian Rencana Kinerja Tahun 2026

Penyesuaian target kinerja pada Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Penyesuaian Target Kinerja pada Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2026	Penyesuaian Target Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai Renstra Tahun 2025-2029				
	a. Tingkat kematangan Aspek Keamanan Siber	Indeks	n/a	1,6	1,6
	b. Indeks Pembangunan Statistik	Indeks	n/a	3,05	3,05
	c. Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik	Indeks	84,62	84,75	84,75
	d. Tingkat kematangan keamanan siber pemerintah digital	Indeks	n/a	1,6	1,6
	e. Nilai Domain Prinsip Satu Data Indonesia	Indeks	n/a	3,27	3,27
	f. Tingkat kematangan Aspek Keamanan Siber	Indeks	n/a	1,6	1,6
II.	Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Renstra Tahun 2025-2029				
	a. Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui	%	99,34	98,6	98,6

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2026	Penyesuaian Target Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
	b. Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100	100	100
	c. Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	%	n/a	100	100
	d. Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	%	n/a	97	97
	e. Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100
	f. Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100
	g. Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100
	h. Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	91,83	90,2	91,83

Sumber: Hasil Analisis, 2026

Dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2026, peninjauan dan penyesuaian target kinerja dilakukan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana tercantum dalam Renstra 2025–2029 dan Bab IV Perubahan RKPD Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Konsistensi Target Indikator Kinerja Utama (IKU): Seluruh sasaran pada 6 (enam) Indikator Kinerja Utama seperti *Tingkat Kematangan Aspek Keamanan Siber (1,6)*, *Indeks Pembangunan Statistik (3,05)*, *Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik (84,75)*, dan *Nilai Domain Prinsip Satu*

Data Indonesia (3,27) dipertahankan konsisten sesuai target awal tahun 2026 dalam Renstra 2025–2029 dan Perubahan RKPD 2026. Hal ini menunjukkan komitmen Dinas Komunikasi dan Informatika untuk tetap menjaga standar mutu layanan informasi, tata kelola data, dan SPBE secara rasional dan akuntabel.

2. Penyesuaian Rasional pada Indikator Kinerja Kunci (IKK): Sebagian besar IKK dipertahankan pada target optimal 100% (seperti persentase layanan publik online/terintegrasi, persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan data statistik serta koneksi internet). Sedangkan IKK akses publik terhadap informasi keuangan daerah dan Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-109 Tahun 2026 tentang Indikator Kinerja Kunci, Bobot, dan Penilaian Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sudah tidak termasuk penilaian Indikator Kinerja Kunci (IKK).

   Namun demikian, terdapat penyesuaian target pada indikator "Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah" (IKK poin h) dari target awal sebesar 90,2% disesuaikan menjadi 91,83% (dengan capaian realisasi tahun 2025 sebesar 91,83%). Penyesuaian ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi objektif atas capaian tahun sebelumnya dan dinamika eskalasi ancaman siber, kecukupan infrastruktur pengamanan, serta penyesuaian efisiensi alokasi anggaran pada Perubahan Renja Tahun 2026 agar target yang ditetapkan tetap realistis, terukur, dan dapat dicapai (*achievable*).

3.2. Perubahan Rencana Pendanaan Tahun 2026

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)					PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026		Lokasi	Sumber Dana	NASIONAL	DAERAH			
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							**30,237,677,324.00**	**23,393,147,658.53**	**21,053,051,658.53**	**-9,184,625,665.47**						**23,943,141,084.00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**30,237,677,324.00**	**23,393,147,658.53**	**21,053,051,658.53**	**-9,184,625,665.47**						**23,943,141,084.00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**26,069,881,888.00**	**19,507,318,768.53**	**19,495,329,948.53**	**-6,574,551,939.47**						**22,156,026,384.00**	
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah**				**81,60 94.3 Angka Angka**	**81,60 94.3 Angka Angka**	**7,895,751,328.00**	**8,597,481,877.16**	**8,609,496,057.16**	**-544,451,179.00**						**7,351,300,149.00**	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 %	100 %	24,367,500.00	2,450,000.00	4,550,000.00	-19,817,500.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Dinas Komunikasi dan Informatika		24,367,500.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	9,850,000.00	2,450,000.00	2,450,000.00	-7,400,000.00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan			9,850,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Laporan	16 Laporan	14,517,500.00	0.00	2,100,000.00	-12,417,500.00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan			14,517,500.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan				100 %	100 %	6,807,280,946.00	7,752,373,796.13	7,742,773,796.13	935,492,850.13			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Dinas Komunikasi dan Informatika		6,262,919,767.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				47 Orang/bulan	54 Orang/bulan	6,650,980,946.00	7,600,153,796.13	7,600,153,796.13	949,172,850.13	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan			6,106,619,767.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	152,220,000.00	152,220,000.00	141,120,000.00	-11,100,000.00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan			152,220,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)						PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026		Lokasi	Sumber Dana	NASIONAL	DAERAH				
															pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan				
	2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	4,080,000.00	0.00	1,500,000.00	-2,580,000.00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan			4,080,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100 %	100 %	4,037,500.00	0.00	0.00	-4,037,500.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Dinas Komunikasi dan Informatika		4,037,500.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	0 Laporan	4,037,500.00	0.00	0.00	-4,037,500.00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan			4,037,500.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 %	100 %	19,960,000.00	0.00	3,030,000.00	-16,930,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Dinas Komunikasi dan Informatika		19,960,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	12 Dokumen	19,960,000.00	0.00	3,030,000.00	-16,930,000.00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan			19,960,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum				100 %	100 %	333,789,522.00	244,554,434.00	298,002,834.00	-35,786,688.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Dinas Komunikasi dan Informatika		333,699,522.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				13 Paket	13 Paket	11,984,690.00	11,984,690.00	11,984,690.00	0.00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik			11,984,690.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)						PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026		Lokasi	Sumber Dana	NASIONAL	DAERAH				
																yang berkualitas dan berkeadilan				
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	9 Paket	99,800,000.00	93,850,000.00	132,850,000.00	33,050,000.00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan			99,800,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				7 Paket	8 Paket	18,476,732.00	11,691,244.00	15,802,044.00	-2,674,688.00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan			18,476,732.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	3 Paket	3,862,100.00	2,743,000.00	3,535,600.00	-326,500.00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan			3,862,100.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	4,500,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	-1,500,000.00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan			4,500,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	7,865,000.00	2,370,000.00	5,370,000.00	-2,495,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan			7,862,500.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	179,608,500.00	118,915,500.00	125,460,500.00	-54,148,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan			179,521,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	0 Dokumen	4,037,500.00	0.00	0.00	-4,037,500.00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan			4,037,500.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)					PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026		Lokasi	Sumber Dana	NASIONAL	DAERAH				
	2.16.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	0 Dokumen	3,655,000.00	0.00	0.00	-3,655,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan			3,655,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	338,815,860.00	325,787,947.03	282,113,727.03	-56,702,132.97			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Dinas Komunikasi dan Informatika		338,815,860.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	7,236,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	-1,236,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan			7,236,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan			30,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	24,971,220.00	13,300,519.03	17,893,775.03	-7,077,444.97	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan			24,971,220.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	276,608,640.00	276,487,428.00	228,219,952.00	-48,388,688.00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan			276,608,640.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah				100 %	100 %	367,500,000.00	272,315,700.00	279,025,700.00	-88,474,300.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Dinas Komunikasi dan Informatika		367,500,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas				17 Unit	17 Unit	214,150,000.00	186,145,700.00	186,145,700.00	-28,004,300.00	Kab. Bantul, Semua Kecamata	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi,	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik			214,150,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)						PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026		Lokasi	Sumber Dana	NASIONAL	DAERAH				
		atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya										n, Semua Kel/Desa		serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan				
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				186 Unit	186 Unit	89,700,000.00	86,170,000.00	92,880,000.00	3,180,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan			89,700,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	63,650,000.00	0.00	0.00	-63,650,000.00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan			63,650,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten**				**98,60 %**	**98,60 %**	**1,025,137,000.00**	**1,682,167,036.00**	**1,656,707,036.00**	**993,311,898.00**							**2,018,448,898.00**	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan				100 %	100 %	1,025,137,000.00	1,682,167,036.00	1,656,707,036.00	631,570,036.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat Kabupaten Bantul		2,018,448,898.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo				52 Komunitas	60 Komunitas	133,675,000.00	226,216,000.00	201,056,000.00	67,381,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan			510,935,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				20 Permohonan	20 Permohonan	36,475,000.00	14,700,000.00	14,700,000.00	-21,775,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan			84,574,500.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi				12 Rekomendasi	12 Rekomendasi	257,400,000.00	250,855,160.00	250,855,160.00	-6,544,840.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan	2. Mewujudkan			450,385,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)					PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026		Lokasi	Sumber Dana	NASIONAL	DAERAH				
			prioritas Pemerintah Daerah												korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan				
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				12 Media	12 Media	597,587,000.00	1,190,395,876.00	1,190,095,876.00	592,508,876.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan			972,554,398.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Tingkat kematangan pembangunan/pengembangan aplikasi Tingkat kematangan layanan jaringan intra pemerintah**				**1,60 1,6 Angka Angka**	**1,60 1,6 Angka Angka**	**17,148,993,560.00**	**9,227,669,855.37**	**9,229,126,855.37**	**-4,362,716,223.00**							**12,786,277,337.00**	
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi				95 %	95 %	17,148,993,560.00	9,227,669,855.37	9,229,126,855.37	-7,919,866,704.63			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Perangkat Daerah, Kapanewon, Kalurahan di Kabupaten Bantul		12,786,277,337.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				45 Perangkat Daerah	45 Perangkat Daerah	9,435,410,060.00	2,019,983,104.00	2,029,978,104.00	-7,405,431,956.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan			6,786,688,554.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0032	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE				7 Aplikasi	23 Aplikasi	649,950,000.00	631,260,000.00	626,260,000.00	-23,690,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan			786,439,500.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0033	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali				1 Laporan	2 Laporan	5,507,335,000.00	5,193,125,000.00	5,183,125,000.00	-324,210,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan			3,705,198,250.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0034	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				7 Aplikasi	16 Aplikasi	497,287,500.00	528,770,000.00	524,260,000.00	26,972,500.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan			601,717,875.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)					PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026		Lokasi	Sumber Dana	NASIONAL	DAERAH				
	2.16.03.2.02.0036	Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas				17 Perangkat Daerah	17 Perangkat Daerah	698,348,500.00	595,546,500.00	595,518,500.00	-102,830,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan			469,831,533.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0037	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	229,995,000.00	175,235,251.37	176,235,251.37	-53,759,748.63	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan			278,293,950.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas				1 Dokumen	1 Dokumen	130,667,500.00	83,750,000.00	93,750,000.00	-36,917,500.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan			158,107,675.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**							**329,750,000.00**	**250,936,634.00**	**250,936,634.00**	**-78,813,366.00**							**381,959,934.00**	
1.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah**				**100 % 100,00 %**	**100 % 100 %**	**329,750,000.00**	**250,936,634.00**	**250,936,634.00**	**52,209,934.00**							**381,959,934.00**	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data yang dapat berbagi pakai				100 %	100 %	329,750,000.00	250,936,634.00	250,936,634.00	-78,813,366.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Perangkat Daerah, Kapanewon dan Kalurahan di Kabupaten Bantul		381,959,934.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk				80 %	100 %	179,500,000.00	128,950,000.00	128,950,000.00	-50,550,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan			254,639,934.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0021	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral				80 %	100 %	150,250,000.00	121,986,634.00	121,986,634.00	-28,263,366.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba,	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan			127,320,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)						PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026		Lokasi	Sumber Dana	NASIONAL	DAERAH				
															judi, dan penyeludupan.	dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan				
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**							**1,384,949,436.00**	**1,181,796,256.00**	**1,181,785,076.00**	**-203,164,360.00**							**1,205,154,766.00**	
1.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Tingkat keamanan informasi pemerintah**				**96,50 %**	**96,50 %**	**1,384,949,436.00**	**1,181,796,256.00**	**1,181,785,076.00**	**-179,794,670.00**							**1,205,154,766.00**	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal				100 %	100 %	985,491,220.00	875,790,000.00	864,471,056.00	-121,020,164.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Perangkat Daerah, Kapanewon, Kalurahan		778,081,220.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian				45 Perangkat Daerah	45 Perangkat Daerah	985,491,220.00	875,790,000.00	864,471,056.00	-121,020,164.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan			778,081,220.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase titik yang diamankan berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan				84 %	84 %	399,458,216.00	306,006,256.00	317,314,020.00	-82,144,196.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Perangkat Daerah, Kapanewon, Kalurahan di Kabupaten Bantul		427,073,546.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.02.0002	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.				45 Kegiatan	45 Kegiatan	399,458,216.00	306,006,256.00	317,314,020.00	-82,144,196.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan			427,073,546.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**2,453,096,000.00**	**2,453,096,000.00**	**125,000,000.00**	**-2,328,096,000.00**							**200,000,000.00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Indeks Teknologi Informasi dan Komunikasi**				**2,54 angka**	**2,54 angka**	**2,453,096,000.00**	**2,453,096,000.00**	**125,000,000.00**	**-2,253,096,000.00**							**200,000,000.00**	
	2.22.08.5.04	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Capaian kinerja pembangunan sistem informasi				100 %	100 %	2,453,096,000.00	2,453,096,000.00	125,000,000.00	-2,328,096,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Padukuhan dan Satuan Ruang Strategis Kabupaten Bantul		200,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.22.08.5.04.0002	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	Jumlah Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital yang Dibangun				5 Objek	6 Objek	2,453,096,000.00	2,453,096,000.00	125,000,000.00	-2,328,096,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik			200,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)						PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026		Lokasi	Sumber Dana	NASIONAL	DAERAH				
																yang berkualitas dan berkeadilan				
	J U M L A H								**30,237,677,324.00**	**23,393,147,658.53**	**21,053,051,658.53**	**68,099,809,423.50**							**23,943,141,084.00**	

Sumber : SIPD diakses tanggal 14 Agustus 2026

3. Gambaran Umum dan Reorientasi Anggaran Perubahan

   Berdasarkan tabel Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2026 pada Dinas Komunikasi dan Informatika, terlihat bahwa arah kebijakan anggaran tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang berkualitas, pelayanan publik, keterbukaan informasi, serta transformasi digital. Secara umum, pagu anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika mengalami penyesuaian dari APBD 2026 sebesar Rp23.393.147.658,53 menjadi Rp21.053.051.658,53 pada RKPD Perubahan 2026, namun tetap mempertahankan program-program prioritas yang mendukung reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

   Peta alokasi anggaran per program utama pada RKPD Perubahan 2026 adalah sebagai berikut:

   a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: Rp8.609.496.057,16 (40,89% dari total anggaran)
   b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika (SPBE): Rp9.229.126.855,37 (43,84% dari total anggaran)
   c. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik: Rp1.656.707.036,00 (7,87% dari total anggaran)
   d. Program Penyelenggaraan Persandian (Keamanan Informasi): Rp1.181.785.076,00 (5,61% dari total anggaran)
   e. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Satu Data): Rp250.936.634,00 (1,19% dari total anggaran)
   f. Program Penyelenggaraan Keistimewaan DIY (Urusan Kebudayaan Digital): Rp125.000.000,00 (0,59% dari total anggaran)

4. Analisis Keterbukaan Informasi Publik dan Layanan Publik

   Anggaran Keterbukaan Informasi Publik dikelola di bawah Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (Kode 2.16.02) sebesar Rp1.656.707.036,00, dengan fokus kegiatan:

   a. Pelayanan Informasi Publik (PPID - Kode 2.16.02.2.01.0017): Alokasi sebesar Rp14.700.000,00 dialokasikan khusus untuk operasional PPID dalam melayani permohonan informasi publik target 20 permohonan/tahun.

b. Pengelolaan Media Komunikasi Publik (Kode 2.16.02.2.01.0021): Dialokasikan sebesar Rp1.190.095.876,00 untuk diseminasi informasi pembangunan daerah melalui saluran media publik.
c. Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Masyarakat (KIM - Kode 2.16.02.2.01.0015): Dialokasikan sebesar Rp201.056.000,00 untuk pemberdayaan 60 Komunitas Informasi Masyarakat di Kapanewon dan Kalurahan.
d. Monitoring Informasi Kebijakan dan Opini Publik (Kode 2.16.02.2.01.0019): Dialokasikan sebesar Rp250.855.160,00 untuk menjaring *feedback* dan aspirasi masyarakat.

Catatan Analisis KIP: Meskipun alokasi anggaran langsung *(direct budget)* PPID secara kuantitatif relatif terbatas sebesar Rp14.700.000,00, dukungan infrastruktur penunjangnya telah terintegrasi secara optimal melalui pengelolaan portal digital, kanal media publik, dan sistem penanganan aduan masyarakat di bawah domain Aplikasi Informatika (SPBE). Diharapkan keterbukaan informasi tidak sekadar diukur dari pemenuhan permohonan informasi tertulis, tetapi juga dari kemudahan akses publik secara mandiri (*self-service information*) melalui kanal digital.

5. Analisis Anggaran Responsif Gender (ARG) dan Inklusivitas Literasi

Anggaran Responsif Gender (ARG) pada instansi Komunikasi dan Informatika berorientasi pada kesetaraan akses teknologi (inklusi digital), keterwakilan kelompok rentan, serta literasi informasi yang berperspektif gender.

a. Inklusi Akses Teknologi dan Internet Desa: Melalui kegiatan Penyediaan Akses Internet (Kode 2.16.03.2.02.0036) sebesar Rp595.518.500,00 serta Jaringan Intra Pemerintah (Kode 2.16.03.2.02.0024) sebesar Rp2.029.978.104,00 jangkauan internet diperluas hingga tingkat Kalurahan/Pedesaan. Hal ini memangkas hambatan geografis dan ekonomi bagi kelompok perempuan, difabel, serta lansia dalam mengakses layanan publik digital.
b. Kemitraan Komunitas berperspektif Inklusif (KIM): Alokasi Rp201.056.000,00 pada kegiatan Kemitraan Komunikasi (KIM) melibatkan unsur organisasi perempuan lokal (seperti PKK, Kelompok

Tani Wanita, dan kelompok usaha perempuan) sebagai agen literasi digital dan pencegahan *hoax*.

c. Penguatan Layanan Informasi Ramah Gender: Penyusunan dokumen analisis gender (*Gender Budget Statement*/GBS) disarankan untuk melekat pada sub-kegiatan Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE (Kode 2.16.03.2.02.0032) sebesar Rp626.260.000,00 agar setiap standar antarmuka (*UI/UX*) aplikasi dan layanan publik daerah mengakomodasi kebutuhan aksesibilitas difabel dan kelompok rentan (*inclusive e-government*).

6. Analisis Transformasi Digital (SPBE) dan Satu Data Indonesia

a. Fokus Utama Anggaran: Program Pengelolaan Aplikasi Informatika (2.16.03) menyerap porsi terbesar anggaran instansi, yaitu Rp9.229.126.855,37. Porsi terbesar terserap untuk Penyelenggaraan Pusat Kendali/*Command Center* (Kode 2.16.03.2.02.0033) sebesar Rp5.183.125.000,00 dan Penyelenggaraan Jaringan Intra (Kode 2.16.03.2.02.0024) sebesar Rp2.029.978.104,00.

b. Integrasi Data (Satu Data Indonesia): Melalui Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral (2.20.02) senilai Rp250.936.634,00 (terbagi atas Pemenuhan Prinsip SDI sebesar Rp128.950.000,00 dan Proses Bisnis Statistik Sektoral sebesar Rp121.986.634,00), Dinas Komunikasi dan Informatika Bantul mengawal validitas dan interoperabilitas data lintas Sektor/OPD untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data (*data-driven policy*).

7. Analisis Keamanan Siber dan Persandian

Di tengah peningkatan ancaman siber pada sistem pemerintah, Program Penyelenggaraan Persandian (2.21.02) mengalokasikan anggaran sebesar Rp1.181.785.076,00 yang terbagi menjadi:

a. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi (Kode 2.21.02.2.01.0007): Rp864.471.056,00 untuk perlindungan server dan infrastruktur informasi 45 Perangkat Daerah.

b. Operasionalisasi Pola Hubungan Komunikasi Sandi (Kode 2.21.02.2.02.0002): Rp317.314.020,00 untuk pengamanan jalur komunikasi rahasia daerah.

8. Rekomendasi Strategis
   a. Penguatan Gender Mainstreaming (ARG): Perlu disusun *Tagging* Anggaran Responsif Gender (ARG) eksplisit pada sub-kegiatan literasi digital masyarakat dan pembuatan standar portal informasi agar memenuhi kriteria WCAG (*Web Content Accessibility Guidelines*) bagi penyandang disabilitas.
   b. Efisiensi dan Inovasi Berkelanjutan: Meskipun terjadi penurunan pagu secara keseluruhan sebesar 30,37%, optimalisasi infrastruktur *cloud/Pusat Kendali* (yang memakan porsi 55% dari anggaran SPBE) harus diimbangi dengan efisiensi konsolidasi aplikasi redundan lintas OPD.
   c. Peningkatan Indeks KIP: Mendorong alokasi integrasi sistem informasi PPID Utama dan PPID Pembantu agar kemudahan akses informasi publik tetap optimal dan tepat waktu sesuai standar Komisi Informasi.

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 ini disusun berdasarkan hasil evaluasi kineja dan capaian pelaksanaan program serta kegiatan yang menunjukkan adanya dinamika kebutuhan perkembangan keadaan. Penyusunan dokumen ini sepenuhnya berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Dokumen Perubahan Renja Tahun 2026 ini akan menjadi acuan teknis dan pedoman operasional utama dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD Tahun 2026. Diharapkan seluruh program, kegiatan, dan alokasi anggaran yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, akuntabel, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat demi mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal di Kabupaten Bantul.

KEPALA,

Bobot Ariffi Aidin, S.T., M.T
NIP. 196906191996031003
Pembina Utama Muda, IV/c